



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK/.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2107 Nomor 1884);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2018.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
5. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi; dan
- c. alokasi formula.

Pasal 3

Pagu Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa.

Pasal 4

Pagu Alokasi Afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b, dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 5

Pagu Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c, dihitung sebesar 20% (dua puluh persen) dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut :

- a. 10 % (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 50 % (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 15 % (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 25 % (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 6

Penghitungan alokasi afirmasi bagi beberapa Desa yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$AA \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan :

- AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa
DD = pagu Dana Desa nasional
DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 7

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF \text{ Kab} = [(0,10 \times Y1) + (0,50 \times Y2) + (0,15 \times Y3) + (0,25 \times Y4)] \times (0,20 \times DD_{\text{Kab}})$$

Keterangan :

- AF Kab = Alokasi Formula setiap kabupaten/kota
Y1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa setiap kabupaten/kota terhadap total penduduk Desa nasional
Y2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap kabupaten/kota terhadap total penduduk miskin Desa nasional
Y3 = rasio luas wilayah Desa setiap kabupaten/kota terhadap total luas wilayah Desa nasional
Y4 = rasio IKK kabupaten/kota terhadap total IKK kabupaten/kota yang memiliki Desa

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Barito Utara ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus).

- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah :
 - a. kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada bupati; dan
 - b. kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Dana Desa Akhir Tahun kepada bupati.
- (5) Peraturan Desa mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b, disampaikan Kepala Desa kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah :
 - a. kepala Desa menyampaikan kepada Bupati laporan realisasi penyerapan dan capaian *Output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kepala Desa menyampaikan kepada Bupati berupa Laporan Pertanggungjawaban/LPj penggunaan Dana Desa tahap I dan II tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober.

BAB IV

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.

BAB V

SANKSI

Pasal 11

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 2 Januari 2018



BUPATI BARITO UTARA,

[Signature]
NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
Pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

[Signature]

JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018 NOMOR . 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

[Signature]

FAKHRI FAUZI
NIP. 19710921 199803 1 004

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 3 TAHUN 2018
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN BARITO UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2018

**RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	Kecamatan/ Desa	Jumlah Dana Desa (Rp.)	Pembagian Tahapan		
			Tahap I (20%) (Rp.)	Tahap II (40%) (Rp.)	Tahap II (40%) (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I Kecamatan Teweh Tengah					
1	LEMO I	781,259,000	156,251,800	312,503,600	312,503,600
2	LEMO II	1,487,568,000	297,513,600	595,027,200	595,027,200
3	PENDREH	1,284,254,000	256,850,800	513,701,600	513,701,600
4	RIMBA SARI	780,616,000	156,123,200	312,246,400	312,246,400
5	SEI RAHAYU I	822,938,000	164,587,600	329,175,200	329,175,200
6	SEI RAHAYU II	733,049,000	146,609,800	293,219,600	293,219,600
7	BERINGIN RAYA	740,831,000	148,166,200	296,332,400	296,332,400
8	DATAI NIRUI	737,838,000	147,567,600	295,135,200	295,135,200
JUMLAH		7,368,353,000	1,473,670,600	2,947,341,200	2,947,341,200
II Kecamatan Teweh Baru					
1	LIANG NAGA	1,328,749,000	265,749,800	531,499,600	531,499,600
2	SABUH	1,090,526,000	218,105,200	436,210,400	436,210,400
3	HAJAK	1,151,884,000	230,376,800	460,753,600	460,753,600
4	MALAWAKEN	905,038,000	181,007,600	362,015,200	362,015,200
5	SIKUI	976,177,000	195,235,400	390,470,800	390,470,800
6	PANAEN	770,988,000	154,197,600	308,395,200	308,395,200
7	LIANG BUAH	803,933,000	160,786,600	321,573,200	321,573,200
8	GANDRING	891,115,000	178,223,000	356,446,000	356,446,000
JUMLAH		7,918,410,000	1,583,682,000	3,167,364,000	3,167,364,000
III Kecamatan Teweh Selatan					
1	TRAHEAN	785,315,000	157,063,000	314,126,000	314,126,000
2	TRINSING	846,561,000	169,312,200	338,624,400	338,624,400
3	BINTANG NINGGI I	756,775,000	151,355,000	302,710,000	302,710,000
4	BINTANG NINGGI II	749,248,000	149,849,600	299,699,200	299,699,200
5	BUTONG	877,648,000	175,529,600	351,059,200	351,059,200
6	BUNTOK BARU	789,688,000	157,937,600	315,875,200	315,875,200
7	BUKIT SAWIT	904,158,000	180,831,600	361,663,200	361,663,200
8	TAWAN JAYA	879,335,000	175,867,000	351,734,000	351,734,000
9	PANDRAN RAYA	796,178,000	159,235,600	318,471,200	318,471,200
10	PANDRAN PERMAI	746,160,000	149,232,000	298,464,000	298,464,000
JUMLAH		8,131,066,000	1,626,213,200	3,252,426,400	3,252,426,400

IV	Kecamatan Lahei				
1	IPU	819,935,000	163,987,000	327,974,000	327,974,000
2	MUKUT	855,358,000	171,071,600	342,143,200	342,143,200
3	MUARA BAKAH	750,770,000	150,154,000	300,308,000	300,308,000
4	JUJU BARU	776,414,000	155,282,800	310,565,600	310,565,600
5	MUARA INU	784,979,000	156,995,800	313,991,600	313,991,600
6	BENGAHON	751,486,000	150,297,200	300,594,400	300,594,400
7	RAHADEN	817,080,000	163,416,000	326,832,000	326,832,000
8	MUARA PARI	820,216,000	164,043,200	328,086,400	328,086,400
9	HARAGANDANG	821,017,000	164,203,400	328,406,800	328,406,800
10	KARENDAN	910,684,000	182,136,800	364,273,600	364,273,600
11	HURUNG ENEP	762,901,000	152,580,200	305,160,400	305,160,400
	JUMLAH	8,870,840,000	1,774,168,000	3,548,336,000	3,548,336,000
V	Kecamatan Lahei Barat				
1	NIHAN HILIR	1,063,884,000	212,776,800	425,553,600	425,553,600
2	NIHAN HULU	736,212,000	147,242,400	294,484,800	294,484,800
3	LUWE HILIR	798,300,000	159,660,000	319,320,000	319,320,000
4	LUWE HULU	812,886,000	162,577,200	325,154,400	325,154,400
5	JANGKANG BARU	820,348,000	164,069,600	328,139,200	328,139,200
6	JANGKANG LAMA	743,448,000	148,689,600	297,379,200	297,379,200
7	PAPAR PUJUNG	818,390,000	163,678,000	327,356,000	327,356,000
8	TELUK MALEWAI	803,727,000	160,745,400	321,490,800	321,490,800
9	BENAO HILIR	830,479,000	166,095,800	332,191,600	332,191,600
10	BENAO HULU	856,740,000	171,348,000	342,696,000	342,696,000
11	KARAMUAN	834,319,000	166,863,800	333,727,600	333,727,600
	JUMLAH	9,118,733,000	1,823,746,600	3,647,493,200	3,647,493,200
VI	Kecamatan Teweh Timur				
1	SAMPIRANG I	786,519,000	157,303,800	314,607,600	314,607,600
2	SAMPIRANG II	843,935,000	168,787,000	337,574,000	337,574,000
3	LLJU	768,387,000	153,677,400	307,354,800	307,354,800
4	BENANGIN III	750,781,000	150,156,200	300,312,400	300,312,400
5	BENANGIN II	797,117,000	159,423,400	318,846,800	318,846,800
6	BENANGIN V	781,757,000	156,351,400	312,702,800	312,702,800
7	BENANGIN I	817,844,000	163,568,800	327,137,600	327,137,600
8	MUARA WAKAT	745,444,000	149,088,800	298,177,600	298,177,600
9	MAMPUAK I	812,044,000	162,408,800	324,817,600	324,817,600
10	JAMUT	807,130,000	161,426,000	322,852,000	322,852,000
11	SEI LLJU	821,483,000	164,296,600	328,593,200	328,593,200
12	MAMPUAK II	830,081,000	166,016,200	332,032,400	332,032,400
	JUMLAH	9,562,522,000	1,912,504,400	3,825,008,800	3,825,008,800

VII	Kecamatan Gunung Timang				
1	MALUNGAI	712,907,000	142,581,400	285,162,800	285,162,800
2	RARAWA	717,816,000	143,563,200	287,126,400	287,126,400
3	KETAPANG	724,238,000	144,847,600	289,695,200	289,695,200
4	WALUR	775,204,000	155,040,800	310,081,600	310,081,600
5	BALITI	744,629,000	148,925,800	297,851,600	297,851,600
6	MAJANGKAN	744,594,000	148,918,800	297,837,600	297,837,600
7	KANDUI	1,033,091,000	206,618,200	413,236,400	413,236,400
8	PAYANG ARA	735,334,000	147,066,800	294,133,600	294,133,600
9	JAMAN	721,173,000	144,234,600	288,469,200	288,469,200
10	PELARI	731,126,000	146,225,200	292,450,400	292,450,400
11	SANGKORANG	737,001,000	147,400,200	294,800,400	294,800,400
12	SIWAU	738,817,000	147,763,400	295,526,800	295,526,800
13	TONGKA	815,461,000	163,092,200	326,184,400	326,184,400
14	BATU RAYA I	1,154,962,000	230,992,400	461,984,800	461,984,800
15	BATU RAYA II	816,373,000	163,274,600	326,549,200	326,549,200
16	TAPEN RAYA	709,836,000	141,967,200	283,934,400	283,934,400
	JUMLAH	12,612,562,000	2,522,512,400	5,045,024,800	5,045,024,800
VIII	Kecamatan Gunung Purei				
1	TANJUNG HARAPAN	710,707,000	142,141,400	284,282,800	284,282,800
2	LENON BESI I	708,175,000	141,635,000	283,270,000	283,270,000
3	LENON BESI II	688,825,000	137,765,000	275,530,000	275,530,000
4	MUARA MEA	733,566,000	146,713,200	293,426,400	293,426,400
5	LAWARANG	718,020,000	143,604,000	287,208,000	287,208,000
6	LAMPEONG I	719,477,000	143,895,400	287,790,800	287,790,800
7	LAMPEONG II	759,076,000	151,815,200	303,630,400	303,630,400
8	PAYANG	727,629,000	145,525,800	291,051,600	291,051,600
9	BERONG	726,191,000	145,238,200	290,476,400	290,476,400
10	BAOK	738,699,000	147,739,800	295,479,600	295,479,600
11	TAMBABA	724,041,000	144,808,200	289,616,400	289,616,400
	JUMLAH	7,954,406,000	1,590,881,200	3,181,762,400	3,181,762,400
IX	Kecamatan Montallat				
1	SIKAN	868,066,000	173,613,200	347,226,400	347,226,400
2	RUBEI	759,865,000	151,973,000	303,946,000	303,946,000
3	PEPAS	819,961,000	163,992,200	327,984,400	327,984,400
4	RUJI	771,735,000	154,347,000	308,694,000	308,694,000
5	PARING LAHUNG	767,937,000	153,587,400	307,174,800	307,174,800
6	KAMAWEN	791,523,000	158,304,600	316,609,200	316,609,200
	JUMLAH	4,779,087,000	955,817,400	1,911,634,800	1,911,634,800
	TOTAL	76,315,979,000	15,263,195,800	30,526,391,600	30,526,391,600



BUPATI BARITO UTARA,

NADALSYAH